



Petani Tegalrejo

Tersisa 16 Orang

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah petani di kawasan Kota Yogyakarta merasa khawatir dengan alih fungsi lahan yang kian masif di wilayah ini. Ironisnya, lahan pertanian yang saat ini digarap oleh petani, bukan lagi milik mereka. Namun, petani hanya menjadi penggarap dengan sistem bagi hasil pada pihak swasta.

Sugiyanto, satu petani di kawasan Tegalrejo hanya terus berusaha dan berdoa agar profesi petani tak semakin terhimpit dengan bangunan dan permukiman. Kekhawatirannya pun semakin menjadi kala lahan pertanian di wilayahnya semakin beralih fungsi.

"Kami masih bisa bangga dengan adanya hasil panen meskipun lahan pertanian semakin menipis dengan alih fungsi la-


Kami memohon pada pemilik lahan untuk tidak mengalihfungsikan lahannya

Sugiyanto
Petani Tegalrejo

han." ujarnya di hadapan Wali Kota Yogyakarta dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kota Yogyakarta saat panen raya di lahan pertanian Tegalrejo, Senin (10/7).

• ke halaman 14

Petani Tegalrejo Tersisa

• Sambungan Hal 13

Sugiyanto yang juga Ketua Kelompok Tani Ngudi Rejo mengatakan, lahan pertanian di wilayah Tegalrejo ada sekitar 5,1 hektare lebih. Namun, sejak 15 tahun terakhir, lahan tersebut sudah tak dimiliki warga lokal.

"90 persen sudah dimiliki oleh swasta atau pengusaha besar. Petani hanya sebagai penggarap dengan sistem bagi hasil," jelasnya.

Sementara, seiring perkembangan zaman, jumlah petani pun menurun dari 53 orang kini tinggal 16 orang. Itu pun, semuanya tidak punya lahan sendiri. Sehingga, sewaktu-waktu saat pemilik lahan menjualnya, maka para petani akan merana.

Isu alih fungsi lahan di perkotaan pun selalu disikapi oleh Sugiyanto dan kelompok taninya dengan berkarya menanam varietas padi unggulan. Untuk musim tanam lalu, pihaknya beralih dari padi *ciherang* menjadi padi *gogo segrang* yang menghasilkan beras merah.

Varietas ini, kata dia, termasuk langka dan hanya bisa dikembangkan di kawasan seperti Gunungkidul. Namun, berkat ketelatenan, akhirnya petani di Tegalrejo bisa memanen.

Untuk harga tebus gabah basahnya pun mencapai Rp4.800 per kilogram. Harga ini cukup tinggi dibandingkan dengan harga di kawasan lain yang mencapai Rp4.300 per kilogram.

Hasil panennya pun cukup memuaskan. Meskipun,

lahan pertanian semakin menyempit dan di segala penjuru sudah dikepeng permukiman dan bangunan. Tidak seperti tahun 1980-an di mana Jalan Godean masih terlihat jelas karena lahan persawahan masih terbentang luas.

"Kami terus berupaya untuk bertani dan memohon pada pemilik lahan untuk tidak mengalihfungsikan lahannya. Kalau (alih fungsi) terjadi, kami akan kehilangan mata pencaharian," jelasnya.

Hadirnya permukiman, selain menjadi bom waktu, bagi petani menimbulkan persoalan tersendiri. Penanaman padi yang dibanggakan oleh para pimpinan daerah Kota Yogyakarta ini harus terkendala dengan pembuangan air yang cukup sulit.

"Kendalanya adalah urusan pembuangan air. Banyaknya bangunan di sekitar sawah menjadikan air sulit dibuang," ujarnya.

Batasi

Sugiyanto pun menaruh banyak harapan dengan pemerintah kota, yakni membatasi atau melarang alih fungsi lahan pertanian. Caranya, bisa dengan mempersulit jual beli lahan ke tangan pengusaha.

Masalah yang kerap ditemui oleh petani di lingkungannya, banyak yang tergoda dengan uang. Bahkan, tak jarang ada intervensi agar petani menjual lahannya. Padahal, pada akhirnya lahan tersebut hanya dikuasai segelintir orang dan menjadikan petani sebagai penonton saja. "Kalau bisa pemerintah mempersulit jual beli lahan pertanian," harapnya.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Provinsi DIY,

alih fungsi lahan di provinsi ini rata-rata per tahunnya mencapai 183 hektare. Hal ini terjadi sejak tahun 2002 hingga 2013.

Melindungi

Kepala Dinas Pertanian DIY, Sasongko menjelaskan, alih fungsi ini menjadi bagian tak terelakkan setiap tahunnya. Alih fungsi ini biasanya dibarengi dengan banyaknya kawasan permukiman baru.

"Sebagai langkah penyelamatan, kami telah menetapkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan (PPLB)," jelasnya.

Dalam Perda tersebut diatur lahan seluas 35.911,59 hektare sebagai lahan abadi untuk pertanian berkelanjutan. Jika dirinci lahan tersebut tersebar di empat kabupaten DIY. Di Sleman lahan pertanian berkelanjutan mencapai 12.377,59 hektare, Bantul (13.000 hektare), Kulonprogo (5.029 hektare) dan Gunungkidul (5.505 hektare).

"Kota Yogya tidak termasuk lahan pertanian berkelanjutan karena luasnya yang sempit," paparnya.

Keprihatinan akan alih fungsi lahan ini juga tidak didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Regenerasi di kalangan petani pun berbanding terbalik dengan jual beli lahan pertanian yang kian masif.

Sasongko menyebut jumlah petani di DIY menurun meski dirinya tak mengetahui data secara pasti. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab jual beli lahan untuk dialihfungsikan. Karena, banyak anak petani yang justru tidak lagi meneruskan profesi mulla ini. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanian dan Pangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005